

BAB III

ANALISA PERAN DAN FUNGSI PARTAI GOLKAR DALAM SISTEM

MULTIPARTAI TAHUN 2009 – 2014

Setelah lengser Presiden Soeharto proses demokratisasi berkembang pesat seiring dengan reformasi yang terus dilakukan dari tahun 1988 sampai sekarang. Hal yang paling menarik adalah reformasi di bidang kepartaian, dimana selama Orde Baru partai dibatasi hanya tiga partai yaitu partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, dan partai Demokrasi Indonesia. Pasca Orde Baru (era reformasi), partai peserta pemilu diberi kebebasan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kondisi tersebut diatas ditenggarai telah mengakibatkan terjadinya pergeseran politik dalam pemilu 2004, dan berbagai analisis yang dilakukan oleh berbagai pakar menyebutkan bahwa dalam masyarakat pemilih telah terjadi kekecewaan terhadap kinerja dari partai tersebut. Perubahan kondisi dari zaman orde baru ke reformasi hingga sekarang membuka kran demokrasi yang sempat tertutup. Terbukanya kran demokrasi kemudian menjadikan peran partai politik menjadi lebih optimal terlebih jika dikaitkan dengan proses penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

Jika membahas tentang proses penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah maka tidak bisa dilepaskan dari fungsi partai politik yang salah satunya adalah peran artikulasi dan agregasi. Fungsi partai politik dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan suara rakyat merupakan salah satu kunci

utama yang harus dijalankan sebagai pengemban amanat yang telah dipercayakan rakyat melalui perwakilannya di parlemen.

Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya.

Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi

kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam.

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam "sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen". Dalam masyarakat demokratis, Partai menawarkan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan tersebut mendukung calon yang diajukan.

Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan seharusnya tercakup dalam usulan kebijaksanaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang. Namun penetapan kebijaksanaan (UU) bukanlah hak semata-mata pihak legislatif. DPR bersama Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang. Kedudukan DPR dan Presiden dalam fungsi agregasi kepentingan adalah sama, sebab kedua lembaga ini berhak untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU). Tentu saja akan terjadi persaingan

ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan

Berbagai pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada dalam masyarakat yang disalurkan oleh partai politik kepada pihak penguasa tersebut dapat berwujud tuntutan-tuntutan dan dapat pula berwujud dukungan-dukungan. Baik tuntutan dan dukungan ini lantas disalurkan kepada pemerintah. Apabila terdapat tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan dari masyarakat yang ada kesamaan-kesamaan atau pun menyangkut masalah-masalah yang sama maka tuntutan dan dukungan itu dijadikan satu. Dalam sebuah sistem politik demokrasi, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan yang dilaksanakan oleh partai politik pada hakekatnya merupakan input atau masukan bagi sistem politik itu sendiri. Input atau masukan tersebut kemudian disalurkan atau disampaikan kepada badan-badan yang mempunyai wewenang menetapkan kebijakan-kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat seluruh warga negara.

Kita semua menyadari bahwa instrumen kelembagaan yang paling strategis dalam mengembangkan pemberdayaan politik masyarakat menuju kedewasaan politik adalah partai politik (parpol), hal ini bisa dipahami karena partai politik merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk mengembangkan sistem kepartaian yang mampu menghasilkan partai politik yang profesional yang dapat menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan bertanggung jawab, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada partai. Adanya partai politik yang

baik diharapkan dapat berpengaruh terhadap kokohnya integrasi nasional, tingginya partisipasi, besarnya legitimasi, maupun efektifnya penyelesaian konflik.

Anggota parlemen adalah wakil rakyat dan karena itu harus ada jaminan bahwa mereka sungguh-sungguh bertindak berdasarkan keinginan rakyat. Hal tersebut kemudian menjadi dasar bahwa dalam setiap perwakilan partai diharapkan mampu membawa dan memperjuangkan suara rakyat sehingga kemudian pada akhirnya akan menjelma menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu juga, wakil rakyat yang duduk di parlemen yang berasal dari partai juga harus mampu menunjukkan bahwa mereka layak dijadikan wakil rakyat yang mampu membawa suara rakyat dan mampu menjadi pioner dalam melakukan control terhadap kinerja dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Dari beberapa fungsi partai yang ada, penulis mempunyai pandangan bahwa dua fungsi tersebut akan dibahas secara lebih fokus mengingat terjalnya perjalanan partai politik dalam memperjuangkan eksistensi fungsi dan perannya serta perjuangan rakyat dalam melawan arus otoritarianisme yang pada akhirnya mampu menerobos dinding terjal tersebut sehingga menarik untuk dibahas secara lebih dalam.

Partai Golkar sebagai sebuah partai politik juga mempunyai fungsi-fungsi tersebut. Dalam menjalankan fungsi tersebut partai Golkar selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Partai politik yang baik baik harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang melekat dalam dirinya.

A. Peran Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada System Multipartai

Latar belakang kelahiran partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Menjadi mudah dicerna dikarenakan partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan perpolitikan atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Bermula pada kemauan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan, partai politik terlahir dari berbagai aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan lahirnya banyak partai (multi partai). Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara.

Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya arah ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan.

Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks prospektif sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada awal

kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan disekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis.

Pada fase berikutnya dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu masa Orde Lama, peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhannya. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidakstabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan bergantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan akibatnya kebijaksanaan politik yang dikeluarkan saat itu lebih bernuansa kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidakpuasan semakin mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat.

Di zaman pemerintahan Orde Baru, peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dicoba ditata melalui UU No. 3 Tahun 1973, partai politik yang jumlahnya cukup banyak di tata menjadi 3 kekuatan sosial politik yang terdiri dari 2 partai politik yaitu PPP dan PDI serta satu Golkar yang merupakan kepanjangan dari Golongan Karya. Namun

penataan partai politik tersebut ternyata tidak membuat semakin berperannya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat.

Partai politik yang diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang populis tidak terwujud. Hal ini terlihat dari kebijaksanaan publik yang dihasilkan pada pemerintahan orde baru ternyata kurang memperhatikan aspirasi politik rakyat dan cenderung merupakan sarana legitimasi kepentingan penguasa dan kelompok tertentu. Akibatnya pembangunan nasional bukan melakukan pemerataan dan kesejahteraan namun menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat oleh pemerintahan orde baru tidak ditempatkan sebagai kekuatan politik bangsa tetapi hanya ditempatkan sebagai mesin politik penguasa dan asesoris demokrasi untuk legitimasi kekuasaan semata. Akibatnya peran partai politik sebagai wadah penyalur betul-betul terbukti nyaris bersifat mandul dan hampir-hampir tak berfungsi.

Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi yang melahirkan proses perubahan dan melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan.

Harapan peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan.

Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada hanya janji dan slogan-slogan kepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan.

Di lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarchisn walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual.

Jika kita membahas system multipartai dimana Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta salah satu partai pengikut pemilu terkait posisinya di pemerintahan, Partai GOLKAR tidak berambisi untuk

mengambil posisi sebagai orang nomor satu. Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada rakyat. Jika rakyat memberikan kepercayaan kepada partai Golkar sebagai partai pemenang dalam pemilu maka partai GOLKAR akan memimpin.

Partai Golkar tidak akan menggunakan cara-cara curang seperti pada zaman Presiden Suharto untuk duduk pada ranah-ranah penting sebagai partai pemenang yang akhirnya menjadikan partai Golongan Karya sebagai penguasa.

Partai GOLKAR akan tetap konsisten sebagai penyalur aspirasi rakyat. Partai Golkar akan membela serta mendukung pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya jika benar untuk mensejahterakan rakyat namun bila terjadi kontradiksi maka Golkar akan tampil sebagai pengoreksi pemerintah agar pemerintah tetap fokus terhadap kepentingan rakyat serta memberikan solusi atau jalan keluar akan problema yang tengah dihadapi.

Partai Golkar tidak pernah mengambil posisi sebagai partai oposisi karena pada dasarnya tidak ada partai yang menganut system presidensial berbarengan dengan menganut partai oposisi. Tidak ada konsep pada Negara integralistik seperti Negara kita menganut system oposisi.

“Negara kita menganut sistem rembug nasional, musyawarah yang dilakukan bersama untuk mewujudkan apa yang diharapkan bersama terutama bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.”

Demikianlah yang diutarakan oleh Bapak Jhon S. Keban.

Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta menjalin persahabatan dengan pemerintah. Partai Golkar akan memback up pemerintah. Tetapi

tidak menjadikan partai GOLKAR sebagai penyeimbang. Jika partai Golkar sebagai Partai penyeimbang maka terjadi jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dan ini tidak diinginkan oleh partai Golkar.

Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta mengambil posisi berada dalam rangka pembangunan, dikarenakan segala otoritas berada di tangan pemerintah. Partai Golkar menjalankan fungsi pengawasan melekat dan tidak menggunakan fungsi legislasi dikarenakan fungsi tersebut dirasakan terlalu birokratis.

Fungsi pengawasan melekat menempatkan kader-kader mengambil langkah-langkah pro aktif yang tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan menggunakan berbagai cara dan saluran.

Gambaran di atas menjadi uraian atas wahana pembelajaran Partai GOLKAR untuk berdemokrasi yang baik.

Partai GOLKAR provinsi D. I. Yogyakarta dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah mencoba menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum yaitu masyarakat. Sering kali masyarakat merasakan dampak negatif suatu kebijakan pemerintah.

Adapun mekanisme dari penyampaian aspirasi dari rakyat melalui partai Golkar sebagai berikut. Pendapat ataupun aspirasi seseorang akan hilang bagaikan pasir di gurun Sahara, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam

bentuk yang lebih teratur. Proses ini lah yang disebut dengan perumusan kepentingan (artikulasi kepentingan). Namun ketidakpuasan mereka kadang diungkapkan dengan berbagai ekspresi yang tidak jelas dan bersifat sporadis. Maka partai Golkar khususnya Dewan Pimpinan Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta mengagregasikan berbagai reaksi dan pendapat masyarakat itu menjadi suatu kehendak umum yang terfokus dan terumuskan dengan baik.

Apabila tidak ada yang mengagregasi dan memngartikulasikan suara rakyat tersebut maka pendapat dan aspirasi akan menjadi simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi maka kesimpangsiuran tersebut dapat diminimalisir dan bahkan ditiadakan karena sudah ada tempat masyarakat untuk mengaspirasikan suaranya tersebut. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik.

Setelah itu kemudian partai Golkar akan merumuskannya menjadi usulan kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan didalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalaui parlemen kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai kebijakan umum. Demikian tuntutan kepentingan rakyat disampaikan rakyat melalui partai Golkar.

Hingga mencapai usia senja partai Golkar tetap berkibar sebagai partai politik besar yang tidak pernah surut akan popularitasnya. Berbagai perubahan politik yang terjadi ternyata tidak mengerdilkan

peranan Partai Golkar dalam berkehidupan. Tetapi, justru menciptakan partai Golkar sebagai partai politik yang semakin matang dan dewasa dalam menjalankan fungsi khususnya dalam menyalurkan aspirasi rakyat.

Partai politik Golkar provinsi D. I. Yogyakarta terus berusaha agar mampu menjadi partai politik yang benar-benar mampu dan bisa menyuarakan atau membawa aspirasi rakyat bahkan di masa mendatang merebut kembali posisi sebagai pemenang.

Sebagai mana diungkapkan oleh Drs. John S. Keban selaku Wakil Ketua Kordinator bidang Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta:

“Partai Golkar khususnya di Provinsi D. I. Yogyakarta mampu untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, hal ini dibuktikan dengan tetap konsistennya partai Golkar dalam rangka mensukseskan program-program reformasi terutama dalam rangka demokratisasi.”²⁵

Partai politik Golkar provinsi D. I. Yogyakarta akan terus memperjuangkan program-program pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat sehingga rakyat merasakan peranan Golkar di dalam di segala sektor.

Dan ditambahkan kembali oleh Drs. John S Keban terkait peranan dewan Pimpinan Daerah partai Golkar khususnya di provinsi D. I. Yogyakarta:

“Kemudian Partai Golkar secara terus menerus tetap menyuarakan aspirasi rakyat walaupun partai politik Golkar

²⁵ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Penulis Dengan Bapak Jhon S. Keban Selaku Wakil Ketua Kordinasi Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta Pada 11 Januari 2011 Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta

menanggung dosa sejarah. Partai Golkar tidak akan tenggelam bersama perubahan politik.”²⁶

Partai Politik Golkar adalah partai yang pro terhadap kepentingan rakyat. Hal ini dibuktikan terhadap produk-produk politik yang akan dikeluarkan. Sebelum produk-produk tersebut dikeluarkan, partai politik Golkar khususnya Provinsi D. I. Yogyakarta terlebih dahulu mengadakan rapat kerja sebelum akhirnya juga akan digodok di parlemen.

Dalam penggodokan tersebut, produk-produk politik itu dikaji secara cermat dan teliti yang selanjutnya dilakukan evaluasi. Termasuk kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak memihak terhadap rakyat, maka partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta lewat fraksinya di parlemen akan tetap bersikap kritis. Namun akan tetap mendukung setiap kebijakan bila kebijakan pemerintah tersebut akan memihak kepada rakyat terutama untuk mensejahterakan rakyat.

Sebenarnya peran partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta dalam menyalurkan aspirasi rakyat khususnya di dalam system kepartaian yang multipartai dijelaskan oleh Wakil Ketua Kordinasi bidang Pendidikan dan Pelatihan Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta sebagai berikut:

“Partai politik Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta tidak melaksanakan kebijakan langsung untuk masyarakat. Yang melaksanakan kebijakan langsung kebijakan-kebijakan partai Golkar itu adalah kadernya yang duduk di parlemen atau birokrasi. Sedangkan peran Dewan Pimpinan Daerah adalah melakukan control kepada kader-kadernya untuk melaksanakan amanat tersebut.”²⁷

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

Mereka adalah kader-kader yang nantinya yang bertugas melakukan komunikasi dan memasarkan produk-produk politik ke tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan pemasaran dan pelayanan.

Dan mereka melakukan pemetaan secara cermat agar lebih terfokus sehingga produk-produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk kesejahteraan.

Sehingga eksistensi partai politik Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah bergantung dari kemampuannya melayani aspirasi dan kepentingan-kepentingan rakyat luas.

Drs. John S Keban selaku Wakil Ketua Kordinasi bidang Pendidikan dan Pelatihan Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta juga menambahkan contoh kinerja partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah:

“Partai Golkar menerima keluhan dari masyarakat tentang keterlambatan Bus Shelter. Kemudian dilakukan rapat kerja secara periodeik di dalam tubuh partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta yang akhirnya digodok kembali di parlemen. Dari hasil kerja perwakilan fraksi Golkar di parlemen berhasil memberhentikan kepala dinas perhubungan, walau awalnya Fraksi Partai Golkar menuntut pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhungan tersebut. Namun melalui kebijakan yang dikeluarkan Gubernur D. I. Yogyakarta adalah memberhentikan kepala dinas perhubungan tersebut.”

Partai politik Golkar khususnya di provinsi D. I. Yogyakarta dan partai-partai politik lainnya boleh menargetkan, namun pencapaian sebuah target tersebut akhirnya ditentukan oleh rakyat. Semuanya

bergantung pada apakah partai politik tersebut mampu berbaur dan menyatu bersama rakyat untuk sebuah proses akan kesejahteraan rakyat.

Seluruh sikap dan pandangan politik partai bila bersebrangan dengan kepentingan rakyat maka partai politik tersebut akan ditinggalkan rakyat.

Di sinilah letak fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah. Bagaimana partai politik mampu merespon secara dini keluhan-keluhan rakyat tanpa rakyat tersebut mengadu dengan menggunakan intuisi politik mampu menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi tengah-tengah persoalan rakyat dan langsung aspirasi rakyat.

Hal senada dibenarkan oleh Bapak Jhon S. Keban:

“Jika rakyat yang mendatangi partai politik untuk mengadukan tentang persoalan-persoalan yang membelit mereka maka partai politik tersebut tidak mempunyai sensitifitas atau kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan rakyat. Dan bagaimana mungkin partai politik yang tidak mempunyai tingkat kepekaan semacam itu mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat luas.”²⁸

Uraian di atas akhirnya semakin menjelaskan bahwa partai politik Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta tetap konsisten terhadap jati dirinya untuk berbuat yang terbaik demi mensejahterakan rakyat.

Sehingga bersikap kritis terhadap permasalahan yang ada serta memberikan jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan tersebut dengan berbagai macam pengalaman yang telah dikantongi partai politik

²⁸ *Ibid*

Golkar dan ditambah dengan kader-kader partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta yang duduk di pemerintahan, walaupun tidak semua kader-kader Golkar duduk menjadi orang nomor satu, sektor-sektor usaha, juga di sector-sektor professional.

Bentuk kongkrit peran dan fungsi Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, Fraksi Partai Golkar yang ada dilegislatif melalui parlementer yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam rangka menyusun perundang-undangan ataupun peraturan daerah, mengalokasikan anggaran secara poporsional sesuai dengan kemampuan daerah. Melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintah sehingga seluruh kebijakan daerah dapat terkontrol dengan baik dengan melakukan pengawasan secara efektif sumber daya masyarakat semakin membaik terhadap pemerintah dalam rangka membangun daerah. Melalui program-program kerja Partai Golkar D. I. Yogyakarta dalam rangka membantu wilayah-wilayah yang terisolasi terutama infrastruktur jalan yang sulit terjangkau oleh masyarakat termasuk di Gunung Kidul, desa panggang untuk mengambil sumber air ditepi laut, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta membeli alat pompa air guna memenuhi kebutuhan air bersih didesa panggang.

Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta tidak menyulitkan masyarakat, prosesnya tidak berbelit-belit semua bisa dilakukan dengan mudah, masyarakat bisa

menyampaikan aspirasinya melalui surat dikirim ke Partai Golkar Provinsi atau masyarakat bisa langsung mendatangi Partai Golkar baik itu ditingkat Provinsi, tingkat kabupaten atau kota, tingkat kecamatan yang nantinya aspirasi masyarakat tersebut akan di follow-up. Mekanisme aspirasi masyarakat Partai Golkar selalu terbuka ada jenjang yang struktural yang bisa memberikan pelayanan kepada publik.

B. Fungsi Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta Dalam Melakukan Kontrol Politik Terhadap Pemerintah Provinsi D. I. Yogyakarta

Kontrol politik partai terhadap kebijakan menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol partai politik dalam kebijakan adalah the power of directing.

Mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat. Untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap pemerintah dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan.

Partai GOLKAR hadir melakukan kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi.

Seperti terlihat pada rapat kelengkapan anggota dewan, fraksi partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta melakukan walk out, dikarenakan ada mekanisme yang tidak tepat. Tidak ada anggaran untuk partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta atas kejadian tersebut namun, fraksi partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta tetap berupaya kritis.

Partai GOLKAR merupakan dapur kerja politik bagi partai yang ada diparlemen Fraksi Partai GOLKAR di DPR merupakan perpanjangan tangan tugas kerja partai GOLKAR. Partai GOLKAR dan induk partainya mengadakan rapat bulanan dalam rangka mengevaluasi tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) akan dikaji dan dianalisis setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi di parlemen, sehingga dengan demikian kader-kader yang ada diparlemen tinggal mengeksekusi dalam porsi kewenangan melalui komisi, badan musyawarah, maupun badan kehormatan DPR.

Mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap Partai GOLKAR kebijakan tersebut tidak pro rakyat. Partai GOLKAR melakukan koreksi-koreksi, mengirim masukan-masukan kepada pemerintah sesuai dengan persoalan yang berkembang dimasyarakat. Harapan Partai GOLKAR adalah karena Sultan Hamengkubuwono X merupakan kader dari Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta maka Sultan Hamengkubuwono X akan memfollow-up kebijakan ditingkat pemerintah agar bisa bersinergis dengan parlemen sehingga Fraksi Partai GOLKAR di Parlemen akan memback-up agar melakukan optimalisasi kebijakan-kebijakan pemerintah implementasinya berjalan dengan baik.

Kebijakan yang berjalan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat kemudian akan segera di follow up oleh partai dan akan segera di usung ke meja legislative dan segera di godok menjadi kebijakan yang kemudian berpihak pada rakyat. Misalkan saja ketika masyarakat Yogyakarta mengeluhkan tentang pelayanan busway yang kurang memuaskan, partai Golkar kemudian mengambil tindakan yang kemudian mampu memberentikan kepala Dinas perubungan Yogyakarta sebagai tindakan konkrit dari fungsi control yang dimiliki oleh parta politik.

Drs. John S Keban selaku Wakil Ketua Kordinasi bidang Pendidikan dan Pelatihan Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta juga menambahkan contoh kinerja partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta Dalam menjalankan fungsi control terhadap kinerja pemerintah :

“Partai Golkar menerima keluhan dari masyarakat tentang keterlambatan Bus Shelter. Kemudian dilakukan rapat kerja secara periodeik di dalam tubuh partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta yang akhirnya digodok kembali di parlemen. Dari hasil kerja perwakilan fraksi Golkar di parlemen berhasil memberhentikan kepala dinas perhubungan, walau awalnya Fraksi Partai Golkar menuntut pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhungan tersebut. Namun melalui kebijakan yang dikeluarkan Gubernur D. I. Yogyakarta adalah memberhentikan kepala dinas perhubungan tersebut.”²⁹

²⁹ *ibid*

Hal tersebut membuktikan bahwa partai Golkar selalu melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap salah satu kebijakan yang ada di Yogyakarta. Partai Golkar senantiasa mewujudkan eksistensinya dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai partai politik.

Partai GOLKAR mempunyai organisasi masyarakat yang didalamnya terdapat organisasi pendiri dan yang didirikan, di Partai pendiri terdapat Soksi, Kosgoro dan organisasi yang didirikan seperti AMPG. Ormas Partai GOLKAR merupakan organ-organ infrastruktur partai yang fungsional turut melakukan fungsi control terhadap kinerja pemerintah. Hal-hal yang menyangkut wilayah kebijakan politik akan dilaporkan kepada Partai dan Partai akan memfollow-up, hal-hal yang sifatnya social kemasyarakatan langsung ditake over oleh ormas tersebut sesuai dengan tupoksi ormas yang ada.

Agar fungsi control berjalan sevara efektif Partai GOLKAR membuka ruang kepada seluruh aspirasi masyarakat D. I. Yogyakarta dalam rangka memberi masukan-masukan kepada Partai GOLKAR maupun Farksi Partai GOLKAR untuk memberi masukan control politik semakin banyak masukan-masukan kepada Partai GOLKAR itu berarti Partai GOLKAR semakin berperan optimal member masukan kepada pemerintah. Ruang-ruang seperti ini dibuka Partai GOLKAR agar proses demokrasi dengan komitmen kedaulatan ada ditangan rakyat, Partai Politik merupakan pilar dari demokrasi mampu menjalankan amanat demokrasi sebaik-baiknya pada tingkat masalahnya.

Bentuk penyampaian control politik secara system yang ada di parlemen Partai GOLKAR bisa menyampaikan masukan kepada gubernur, Partai GOLKAR D. I. Yogyakarta mempunyai kemitraan pemerintah dengan gubernur. Partai politik harus menjadi jaminan mutu pemerintah, jaminan akuntabilitas kebijakan public kepada masyarakat. Peran Partai GOLKAR harus memperkuat Pemerinta Daerah, kalau Pemerintah Daerah lemah Partai GOLKAR mengkritisi, mendorong untuk memperbaiki kinerjanya.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta Pada System Multipartai Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsinya

Dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai partai politik, ternyata partai politik GOLKAR tidak terlepas dari berbagai factor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, keputusan politik partai GOLKAR di Dewan Pimpinan Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta selalu berpedoman pada factor penting yang harus berdasar pada dua aspek penting yaitu atas asas kebutuhan rakyat dan asas manfaat. Jika menjawab kebutuhan rakyat maka harus mengangkat asas yang selalu berpacu pada nilai manfaat khususnya kepada rakyat.

Sebagai mana dikatakan ole Bapak Jhon S. Keban dalam wawancara dengan penulis:

“.....Partai Golkar selalu berpegang teguh pada dua asas penting yaitu, asas kebutuhan dan asas manfaat....”³⁰

Ini akan menjawab aspek keputusan politik partai karena partai politik GOLKAR hadir sebagai pemberi solusi masalah dan partai GOLKAR tidak terjebak pada jargon-jargon politik tetapi partai Politik GOLKAR melihat dan mendudukkan masyarakat sebagai bagian dari GOLKAR itu sendiri dan Golkar ingin mengambil bagian dari persoalan masyarakat dan duduk secara riil secara bersama-sama untuk memecahkan seluruh problematika di tengah-tengah masyarakat dan apa yang dapat dilakukan partai Golkar untuk dapat memfasilitasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Serta ingin menjadikan masyarakat tersebut menjadi bagian-bagian dari diri partai GOLKAR sendiri.

Kedua, peran kader-kader partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta. Membahas peran kader-kader partai GOLKAR di provinsi D. I. Yogyakarta diharapkan harus merupakan sebagai sel-sel induksi yang bergerak secara entetis di lingkungan masyarakat manapun dan kapanpun dia berada.

Peran sekecil apapun harus ambil bagian dalam komponen atau komunitas masyarakat dimanapun dia berada. Hal ini dilakukan bermaksud agar publik atau masyarakat dapat melihat bahwa partai golkar Provinsi D. I. Yogyakarta tetap konsisten. Nantinya masyarakatlah yang

³⁰ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Penulis Dengan Bapak Jhon S. Keban Selaku Wakil Ketua Kordinasi Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta Pada 11 Januari 2011 Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta

akan menilai bahwa partai Golkar mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Ini adalah strategi untuk membangun simpatisan.

Berikutnya ketiga, partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta berupaya melakukan Pemberdayaan melalui *skill training* atau keterampilan-keterampilan dan pelatihan-pelatihan yang menyangkut masalah-masalah pergerakan sektor ekonomi masyarakat kecil, seperti ekonomi rumah tangga, simpan pinjam dan usaha-usaha kecil mikro lainnya. Ini diharapkan agar kader-kader Golkar bukan kader yang mempunyai mental pengemis tetapi didorong untuk mempunyai keunggulan secara skill agar mempunyai keahlian agar melahirkan kegiatan-kegiatan yang produktif dan membantu saudara-saudaranya yang belum mampu berbuat apa-apa. Semuanya dilakukan untuk lebih memotivasi. Ini merupakan bagian dari pola partai Golkar sebagai pendekatan.

Pola komunikasi, partai Golkar membangun komunikasi melalui sebuah pendekatan yang disebut pendekatan hati. Jadi bukan hadir karena sebuah arogansi politik.

Partai Golkar datang untuk mendengarkan keluh kesah secara bersama-sama dengan masyarakat. Yang kemudian di angkat dalam rapat yang dilakukan bersama pimpinan partai. Dan melalui fraksinya diparlemen untuk diusulkan menjadi sebuah kebijakan yang tentukan untuk menyelesaikan persoalan mereka.

Pendekatan semacam ini diyakini oleh partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta sebagai pendekatan yang memungkinkan partai Golkar diterima kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai contoh kongkrit partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta adalah ketika orangtua kesusahan dalam pembiayaan sekolah anak-anaknya. Partai GOLKAR tanpa banyak berbicara langsung membantu para orangtua tanpa meninabobokan mereka. Mereka akhirnya dibina melalui pelatihan yang menjadi program partai GOLKAR.

Selanjutnya di bidang kesehatan. Partai Golkar menyediakan mobil ambulans secara gratis. Ditambah dengan menyediakan truk-truk tanki air dimana air tersebut diperoleh masyarakat juga secara gratis.

Begitu juga pada perayaan natal, pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta memutuskan untuk melaksanakan perayaan natal di panti asuhan di Kulonprogo.

Inilah bentuk dedikasi yang telah terlaksana dan masih harus dibuktikan lagi oleh kader-kader partai GOLKAR. Dimana semua kader-kader partai Golkar harus mengambil posisi.

D. Kendala-Kendala Partai Golkar Propinsi D. I. Yogyakarta Menjalankan Peran dan Fungsinya Dalam Sistem Multipartai

Runtuhnya rezim Presiden Suharto ternyata telah membuka lebar gerbang kebebasan berekspresi. Akhirnya peran dan fungsi partai politik yang mengakomodasi agredasi kepentingan masyarakat serta gerakan

pembangunan semakin diperkuat. Namun saat ini partai politik terjebak pada Euforia kekuasaan. Seharusnya partai politik itu hadir sebagai solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Namun keadaan yang tengah terjadi saat ini tidak begitu. Hal ini sungguh memprihatinkan.

Partai politik saat ini benar-benar tengah terjebak pada situasi yang sangat kritis, dapat dikatakan terjebak karena seluruh partai politik bahkan Golkar sekalipun, bertarung memperebutkan kekuasaan dengan mengesampingkan atau menomor duakan kepentingan rakyat.

Benar bahwa esensi partai politik sesungguhnya adalah berujung pada perebutan kekuasaan namun bukan satu-satunya keabsahan adanya partai politik jika bukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Partai politik hadir secara Praktis dan proporsional. Ball out. Sehingga kelemahan-kelemahan pemerintah dapat dikontrol oleh rakyat agar rakyat tak sengsara dan elit menjadi primadona.

Serta ditambahkannya rasa atau keinginan untuk menaati peraturan, perundangan tentang mengeluarkan pendapat dan berkumpul serta masih diragukannya RUU KKN walaupun sudah diperbaiki dan disempurnakan; Kurangnya dilaksanakan dalam sikap dan tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan menyeluruh, dapat mengakibatkan melesetnya arah ketujuan bersama; hal tersebut akan berimbas pada proses demokrasi dengan organisasi yang sangat banyak dapat memungkinkan lambatnya proses politik.

Jika kita merunut kondisi politik sebagaimana diutarakan di atas maka kendala-kendala partai golkar propinsi D. I. Yogyakarta dalam menghadapi sistem multipartai berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan suara terbanyak akhirnya menjadikan posisi partai politik tereduksi dalam menyusun nominator-nominator kadernya untuk mendedikasikan di parlemen legislatif. Hal itu sedikit banyak melemahkan produktifitas partai politik. Dan memungkinkan persoalan berat terjadi di dalam internal partai dibandingkan eksternal partai politik.

Kemudian partai politik GOLKAR menyadari bahwa anggota legislatif merupakan kader-kader yang terbaik yang akhirnya menduduki parlemen. Kader-kader tersebut tentunya membutuhkan waktu untuk proses adaptasi, pembelajaran untuk berbuat yang terbaik tentunya.

Yang berikutnya dalam kondisi multipartai saat ini yang menjadi kendala terbesar adalah kondisi finansial. D. I. Yogyakarta yang mempunyai luas wilayah lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah masih merasakan kesulitan luar biasa pada aspek finansial. Keadaan ini benar-benar menguras.

Namun, Partai GOLKAR masih didukung dengan para kader-kadernya yang bergerak di sektor professional, dan yang bergerak di bidang bisnis. Merekala yang menopang di sektor pembiayaan partai politik GOLKAR.

Partai GOLKAR pun merasa memperjuangkan nota perundang-undangan kuota perempuan sebesar 30%. Di provinsi D. I. Yogyakarta,

faktanya kuota ini sulit untuk dicapai. Mungkin faktor lingkungan dan budaya yang memaksa para perempuan enggan berpolitik. Yang akhirnya sulit mendaftarkan mereka menjadi anggota legislatif.

Partai Politik GOLKAR sesungguhnya membutuhkan kader-kader muda perempuan, karena GOLKAR secara kelembagaan dapat dikatakan belum maksimal memfasilitasi kegiatan-kegiatan kelompok perempuan.

Untuk kedepan Partai Golkar tidak ingin menodong tangan kepada anggaran yang dibayar oleh rakyat melalui pajak dan pembiayaan lainnya. Partai Golkar berharap partai politik mendatang dapat berdiri secara mandiri.

E. Langkah-Langkah Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta dalam Mejalankan Peran dan Fungsinya

Dalam rangka menjalankan peran serta fungsinya, partai Politik GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta menggunakan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

Pertama adalah melakukan rapat kerja yang dilaksanakan secara periodik. Rapat kerja dilaksanakan di dalam tubuh partai sebelum dibawa ke parlemen, Karena dari hasil rapat kerja periodik inilah buah pikiran partai politik GOLKAR tercurahkan. Ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Partai Politik Golkar adalah kebijakan-kebijakan yang menjawab persoalan-persoalan rakyat.

Di dalam rapat kerja periodik ini, permasalahan-permasalahan yang ada dicoba untuk dikupas secara mendalam agar mengenai akar atau pokok permasalahan yang ada. Termasuk kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak memihak terhadap rakyat, maka partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta lewat fraksinya di parlemen akan tetap bersikap kritis. Namun akan tetap mendukung setiap kebijakan bila kebijakan pemerintah tersebut akan memihak kepada rakyat terutama untuk mensejahterakan rakyat.

Yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik dengan para kader-kadernya, terutama kader yang tengah duduk di parlemen legislatif. Karena melalui mereka buah pikiran partai politik Golkar yang mempunyai esensi sebagai pemberi solusi dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan.

Ketiga adalah, partai Politik GOLKAR juga membangun komunikasi dengan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat. Langkah ini diyakini oleh Partai GOLKAR sebagai langkah yang efektif untuk meningkatkan kepekaan diri terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

Keempat adalah melalui pemberdayaan kader-kader Partai GOLKAR, karena kader-kader tersebutlah yang secara langsung melakukan kontak kepada masyarakat, sehingga mereka dibekali kemampuan dan keterampilan. Dengan demikian akan mengajari kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang memebelit masyarakat.

Selanjutnya adalah reformasi demokrasi. Reformasi adalah perubahan sedangkan demokrasi merupakan hukum yang berlaku. Maka

reformasi demokrasi adalah sebuah hukum yang menuntut perubahan bagi rakyat menuju ke arah yang lebih baik. Dalam arti sebenarnya demokrasi terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik.

Dua belas tahun reformasi seharusnya merupakan waktu yang panjang bagi proses belajar berdemokrasi. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama para elit politik harus telah mampu menggunakan tanggung jawab kekuasaan yang dimiliki untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat. Karena demokrasi memiliki konsekuensi logis. Ketika para pemegang tanggung jawab kekuasaan gagal melaksanakan tanggung jawabnya maka pemegang tanggung jawab tersebut akan tersingkir. Mereka akan tersingkir melalui revolusi sosial.

Upaya kongrit dengan ide-ide rekontruksi dimana sistem kepartai harus dirasionalisasikan. Untuk tahap pertama Golkar menggarapkan cukup dengan lima partai saja. Namun, idealnya menurut pandangan GOLKAR Indonesia memerlukan dua partai besar yang mendominasi sehingga kita tidak terjebak pada agredasi ideologi. Namun, kita berbicara pada ring yang netral sehingga rakyat kita tidak terkotak-kotak. Semua ini ditujukan agar tidak terjadi benturan antara ideologi keyakinan dan ideologi pembangunan.

Sistem pemerintahan yang presidensil seharusnya menganut sistem kepartaian yang berjumlah sedikit sehingga rakyat tidak terlalu dipusingkan. Rakyat hanya perlu berkonsentrasi untuk memilih dua partai yang memiliki

nilai dominan agar nantinya legitimasi diadapan rakyat kuat.³¹ Hal ini juga akan memberikan dampak control yang kuat terhadap pemerintahan dan ini akan memperkecil ruang pertarungan politik di ranah-ranah elit politik yang dieksekusi oleh elit-elit dua partai politik tersebut. Yang kemudian akan mengefektifkan kinerja kerja pra pemerintahan.

Partai politik Golkar mendorong adanya peringkasan jumlah partai politik. Karena dengan demikina pendewasaan demokrsai akan tercipta. Orang-orang akan menyadari bagaimana berpolitik dengan melalui system kepartaian.

Sistem kepartaian yang cocok untuk masa depan Indonesia, harus selalu kita cari dan upayakan. Pada saat ini, sistem multipartai telah menghadirkan demikian banyak partai politik, sehingga dalam konteks tertentu kontraproduktif. Fenomena perpecahan partai-partai politik merupakan konsekuensi logis dari dinamika politik sistem multipartai yang ada sekarang.

Idealnya, partai politik GOLKAR juga berharap ke depan yang terjadi bukan lagi perpecahan tetapi konvergensi politik, sehingga sistem kepartaian kita menjadi relatif lebih sederhana. Tentu saja penyederhanaan sistem kepartaian tersebut membutuhkan suatu proses yang alamiah dan demokratis, bukan dipaksakan sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Baru. Dengan memperhatikan kecenderungan partai-partai politik yang memiliki

³¹Satjipto Raharjo, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketenagakerjaan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. Hal 192

basis yang kuat, sebagai cerminan dari pengelompokan sosial di Indonesia, maka ke depan jumlah partai politik kita mestinya tidak terlalu banyak.

Walaupun masih banyak catatan, namun substansi UU tentang partai politik dan UU tentang pemilu kita kali ini, sudah cukup maju dibandingkan dengan UU-UU sebelumnya. Namun, sebagaimana dikatakan almarhum Nurcholish Madjid, sebagai sebuah proses “trial and error”, proses demokrasi kita perlu terus-menerus kita sempurnakan.

Demikian pula dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu kita, yang juga harus terus-menerus kita sempurnakan.